



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435
Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id> Email : kanwil.babel@kemenkumham.go.id

1. Unit Organisasi : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Satuan Kerja : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2. Tugas Pokok : Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
 - e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Indeks Integritas	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
		Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia	

		sebagai negara penerima maupun negara pemohon	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan	
		Persentase Basan Baran yang dikelola sesuai dengan standar	
		Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar	
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar	
		Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar	
		Persentase tindak lanjut pengaduan penyelenggaraan pemasarakatan sesuai standar	
4	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	
		Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	
		Jumlah penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	
5	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Persentase pemanfaatan Sistem online pengajuan permohonan	

		Kekayaan Intelektual oleh masyarakat	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI	
6	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	
		Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	
		Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	
7	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan progra, aksi HAM	
		Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM	
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	
		Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
8	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	
		Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	
		Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	

		Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
		Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	
9	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dihunakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional	
		Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	



Kepala Kantor Wilayah,

Asas Saeful Anwar
NIP. 19620219 198603 1 002